

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS INTERNET DI KABUPATEN ENREKANG

Nur Azmi^{1*}, Jaelan Usman², Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The management of information and communication technology in the Enrekang Regency Government is currently still sectoral, so it is necessary to integrate efforts in the development pattern and support for integrated information and communication technology policies. It is necessary to think strategically about programs in planning effective and efficient development for a long period of time, and the optimal impact of internet-based telecommunications information in Enrekang Regency. This research uses qualitative research. With the number of informants as many as 6 people. The results of this study indicate that the target of developing an internet-based telecommunications network is in accordance with what is expected by the government of Enrekang Regency. In terms of the policy of developing internet-based telecommunications networks, it is in accordance with the goals expected by the community. There are several programs that are designed and always developed by the government to make it easier for the community. Apart from this, there are several that have been made in the development of internet-based telecommunications networks.

Keywords: strategy, development, network, internet

Abstrak

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu. Perlu berfikir secara strategi program dalam merencanakan pengembangan yang efektif dan efisien untuk jangka waktu yang lama, dan dampak yang optimal dari informasi telekomunikasi berbasis internet di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan sasaran dari pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Kab Enrekang. Dari segi kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet, sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, ada beberapa program yang dirancang dan selalu dikembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakatnya. Selain itu ada beberapa yang dibuat dalam pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet.

Kata kunci: strategi, pengembangan, jaringan, internet

* nurazmi@gmail.com

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sejak tahun 2005, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan konektivitas telekomunikasi. Ketika itu, Proyek Palapa Ring digagas untuk menyatukan Indonesia melalui akses telekomunikasi. Upaya itu dipercepat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Rencana Pita Lebar Tahun 2014-2019. Pemerintah berupaya mengikis kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di seluruh pelosok Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembangan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2006).

Data Bank Dunia, ada 94 juta orang dewasa di Indonesia tahun 2019 masih belum bisa mengakses internet di *handphone*. Kesenjangan akses telekomunikasi dan internet yang terjadi di Indonesia membutuhkan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Menurut Stephanie K Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Artinya pemerintah harus memiliki rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang, penyusunan rencana tersebut dan apa upaya agar tujuan tersebut tercapai. Mulgan (2008) berpendapat bahwa "*Being strategic is*

neither natural nor easy for government". Jadi, untuk menjadi strategis bukanlah hal yang wajar dan tidak mudah bagi pemerintah, tetapi bukan juga hal yang mustahil untuk mencapainya. Oleh karena itu, disinilah diperlukan suatu usaha yang maksimal dan dukungan dari semua pihak sehingga segala yang dicita-citakan akan tercapai demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Nawawi (2008:28) konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pengertian strategi pemerintah dilihat dari pemaknaan, maka istilah yang disebut dengan grand strategi atau strategi tingkat tinggi yaitu seni yang memanfaatkan semua sumber daya untuk mencapai sasaran yang dimiliki oleh instansi pemerintah. William N Dunn dalam bukunya berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1999) yang disunting oleh Dr. Muhadjir Darwin, MPA, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan strategis pemerintah adalah serangkaian informasi baik berupa rencana strategis, rencana aksi maupun berupa kesepakatan, ketentuan dan keputusan yang dihasilkan oleh

Badan dan pejabat pemerintah. Serangkaian kebijakan strategis tersebut merupakan alternatif pilihan langkah-tindakan untuk terwujudnya tujuan yang diinginkan.

Upaya pemerintah dalam percepatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet. Salah satunya adalah Proyek Palapa Ring, jaringan tulang punggung (*backbone*) untuk menyambungkan jaringan serat optik di sejumlah titik perbatasan dan terluar Indonesia seperti Natuna, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Melalui proyek itu, Kementerian Kominfo juga menjadikan layanan internet gratis di 150.000 titik layanan publik. Di kantor polisi, fasilitas kesehatan, sekolah, dan Universitas, layanan itu diberikan hingga 2023 mendatang.

Ketersediaan jaringan Telekomunikasi dan internet memang sangat penting sebab menunjang komunikasi serta berkontribusi merubah taraf hidup masyarakat, berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 563 Daerah yang tergolong sebagai wilayah *Blank Spot* atau wilayah yang belum terdapat jaringan khususnya wilayah Kabupaten bagian Utara dan beberapa wilayah Kabupaten Selatan serta daerah Kepulauan data

belum bergerak sejak Tahun 1998 sehingga perlu menjadi fokus bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pembenahan di 131 titik wilayah yang belum terjangkau jaringan salah satunya Kabupaten Enrekang (Fajar, Sulsel, 2022).

Kabupaten Enrekang dengan Topografi ketinggian dan lembah, saat ini memiliki banyak permasalahan terkait jaringan telekomunikasi. Dengan adanya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi menjadi semakin krusial. Pada era *new normal* kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Bahkan 12 Kecamatan di Kabupaten Enrekang terdapat *blank spot* atau tanpa sinyal, Karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan BTS untuk di pasang pada kurang lebih 27 desa melalui Kominfo pusat (InfoPublik, 2019).

Berbagai permasalahan dalam pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kabupaten Enrekang tentu membutuhkan juga berbagai strategi dan upaya dalam penyelesaiannya dan menjadi tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang. Sesuai dengan tugas pokok DISKOMINFO yakni melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dalam upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari tiga (3) dimensi dalam strategi yakni: (1) sasaran atau tujuan (2) kebijakan (3) program. (J. Winardi (2003: 112).

Berdasarkan hasil observasi atau fakta lapangan problem dari sebuah strategi di dalamnya adalah sebuah pencapaian sasaran, untuk pencapaian sasaran tersebut strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang adalah meningkatkan kualitas berdasarkan perencanaan pengembangan jaringan berbasis internet atau pembangunan BTS. Tidak terlepas dari sebuah sasaran, pemerintah mempunyai kebijakan dalam pengembangan jaringan hal tersebut berkaitan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang No.51 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan

teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang diwujudkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Perlu berfikir secara strategi program dalam merencanakan pembangunan yang efektif dan efisien untuk jangka waktu yang lama, dan dampak yang optimal dari informasi telekomunikasi baik dalam bentuk telepon, SMS dan mengakses internet dengan baik.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2021, untuk urusan Komunikasi dan Informatika ada dua poin penting yang menjadi prioritasnya (1) Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi, dan (2) Pemanfaatan telekomunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang masih belum optimal. Dijelaskan juga bahwa Dukungan Kabupaten Enrekang terhadap Prioritas Nasional “Transformasi Digital” yakni mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet. Dengan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas tentu sangat dibutuhkan berbagai startegi pemerintah dalam memecahkan masalah tersebut. Sehingga Visi: “Enrekang Maju, Aman,

Sejahtera Yang Berkelanjutan dan Religius” dapat terwujud.

Secara umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Secara khusus, Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Menurut J. Winardi (2003:112), dimensi dalam strategi pada suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 1) Tujuan atau sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya, 2) Kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-

peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik, 3) Tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.

Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas aparatur dan tersediannya sumber daya manusia. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah di Daerah, dengan kata lain pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah” (Misdayanti dan Karta sapoetra 1993:17).

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain (Sri, 2015). Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik) pada saat itu juga (Iradath, 2010).

Menurut Oetomo (2002) menyebutkan bahwa internet merupakan singkatan atau kependekan dari *international network*, yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Lebih lanjut dijelaskan pula, jaringan komputer yang sangat besar ini bisa mencakup jaringan seluruh dunia *American Journal of Sociology*, (2019).

Pemanfaatan teknologi internet di Indonesia pada dasarnya baru berkembang di level yang relatif sederhana. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dua tahun belakangan ini jumlah peminat dan pemakai internet di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Interaksi sosial sebagai implikasi dari

berubahnya pola pergerakan dan pola aktivitas juga mengalami perubahan, ditandai dengan menurunnya intensitas pertemuan tatap muka untuk melakukan komunikasi sederhana seperti ngobrol dan diskusi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif Tipe penelitian fenomenologis ini adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial atau fakta sosia yang menjadi masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran

Bentuk-bentuk tercapainya peningkatan sebuah sasaran tersebut

dilihat dari: a) Puasnya masyarakat dalam berkomunikasi dan dapat mengakses data-data melalui jaringan berbasis internet, b) Memperluas pengetahuan dan terbukanya cakrawala masyarakat dan dapat menjadi wahana perubahan sosial yang dampaknya sangat signifikan terhadap kehidupan.

Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kabupaten Enrekang terkait indikator sasaran atau tujuan. Pada bidang kemasyarakatan, masyarakat mampu memperoleh informasi dan bertukar informasi karena informasi tersedia secara melimpah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui internet, kapan saja, sehingga warga masyarakat Kabupaten Enrekang tidak ada yang ketinggalan informasi, seperti contoh, informasi mengenai peternakan, pertanian, informasi olahraga, dan informasi statistik mengenai Kabupaten Enrekang dapat diketahui oleh masyarakat.

Tujuan atau sasaran bisa dikatakan tepat apabila infrastruktur juga mendukung. Akan tetapi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Enrekang yang belum terjangkau jaringan internet. Terlebih masih ada daerah di Kabupaten Enrekang yang mengalami *blank spot* “tanpa sinyal”. Keadaan tersebut sangat memerlukan

strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan itu, jika dilihat dari data diatas bahwa masih ada 25 wilayah kelurahan/desa di Kabupaten Enrekang yang mengalami *blank spot* “tanpa sinyal” dari total 129 kelurahan/desa di Kabupaten Enrekang.

Strategi pemerintah untuk meghadapi permasalahan ini yakni penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah-daerah non-komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah nonkomersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah tersebut. Sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui KEMENKOMINFO untuk menyediakan akses telekomunikasi melalui pembangunan BTS.

Berdasarkan hasil pengamatan ada beberapa *website* dari instansi pemerintah atau Dinas yang tidak bisa diakses, selain permasalahan tidak bisa diakses, ada juga *website* yang tidak update terkait informasi yang disajikan. Permasalahan tersebut muncul karena

DISKOMINFO Kab Enrekang kurang memiliki kelengkapan tim pengelola *website*, sehingga masyarakat yang ingin mencari informasi terkait dengan dinas tersebut menjadi kesulitan. Dua faktor penyebabnya adalah keterbatasan SDM dan konten yang dapat diangkat ke dalam *website*.

Terkait permasalahan diatas dibutuhkan strategi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam hal ini DISKOMINFO Kabupaten Enrekang, yakni mengikut sertakan dan memberikan pelatihan kepada admin *website* OPD atau Dinas terkait agar *website* OPD bisa dikelola dan *diupdate* secara mandiri. Pembaruan konten pada *website* sebaiknya dilakukan berkala untuk menarik minat masyarakat untuk mengakses *website*.

Pada bidang pertanian dapat dirasakan oleh petani karena jika petani memerlukan informasi mengenai pertanian yang tidak dapat segera dilayani para petugas penyuluhan pertanian, maka mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet. Salah satu strtegi pemerintah adalah meluncurkan Program Petani *Go Online* ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif atas permasalahan di sektor pertanian. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan

beberapa pihak seperti startup digital serta Kementerian/Lembaga terkait. Program ini menyasar petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan kurang dari 2 Hektar.

Pada bidang pendidikan, guru juga sangat terbantu karena jika referensi tambahan mengenai bahan ajar mereka diperoleh dari internet. Selain itu pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui jaringan internet.

KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 menyebutkan bahwa ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Artinya masyarakat Kabupaten Enrekang sudah cukup puas dengan teknologi informasi berbasis internet, karena dengan adanya teknologi informasi berbasis internet banyak bidang yang merasa diuntungkan.

Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan, strategi kebijakan pemerintah dan Dinas Kominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai

sasaran strategi dalam pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kabupaten Enrekang. Strategi kebijakan dapat dirumuskan yaitu: a) Peningkatan kebijakan internal, strategi dan perencanaan tatakelola pemerintah berbasis internet. b) Peningkatan infrastruktur TI.

Salah satu infrastruktur yang sangat mempengaruhi pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet adalah BTS 4G, Untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kabupaten Enrekang tidak ada pilihan lain kecuali peningkatan pelayanan dalam hal ini peningkatan jumlah BTS 4G dan pembangunan BTS baru di daerah "*blank spot*" atau tanpa sinyal, sebagai modal utama layanan kepada masyarakat. Karena masyarakat akan sulit mengakses layanan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang apabila jaringan internet tidak stabil.

Strategi pemerintah dalam hal kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet. Pembangunan BTS 4G untuk daerah yang belum terjangkau jaringan internet, berdasarkan data terbaru dari DISKOMINFO Kabupaten Enrekang bahwa jumlah menara telekomunikasi per Agustus 2022 sebanyak 92 menara,

Penambahan tersebut sebagai wujud perhatian DISKOMINFO Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan provider telekomunikasi dalam hal pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet.

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Enrekang memberikan pelayanan berbasis internet, yang sering disebut dengan *E-Government*. Pemberian bantuan komputer untuk sekolah dari pemerintah dan bantuan akses jaringan internet oleh DISKOMINFO Kabupaten Enrekang. Tata kelola pemerintahan berbasis internet sangat perlu dikembangkan bersama untuk menghadapi metamorfosa dunia digitalisasi, Ini sangat penting dilakukan demi mengikuti tren digitalisasi yang semakin berkembang dan menciptakan pelayanan digital yang semakin memudahkan, atau yang biasa disebut *E-Government*, Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Terdapat Dua Puluh Tiga (23) layanan berbasis internet terkoneksi antar OPD nantinya mudah diakses masyarakat luas. Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan internet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang SPBE. Ditemukan masih ada website yang tidak bisa diakses.

Website yang tidak bisa diakses akan mempengaruhi sistem pelayanan berbasis internet. Dibutuhkan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Penyediaan pusat monitoring telekomunikasi terintegrasi merupakan solusi yang sangat penting bagi pemerintah sebagai tool dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpusat, terpadu, efektif dan efisien seiring perkembangan teknologi dan bisnis telekomunikasi serta kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan telekomunikasi yang semakin meningkat. Dengan pembangunan pusat monitoring telekomunikasi terintegrasi maka pemerintah dapat memonitor seluruh performa layanan secara *near realtime*, sebaran infrastruktur dan *coverage* layanan telekomunikasi, *Quality of Services* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta pengaduan masyarakat terhadap Infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi saat ini serta dapat menjadi *big data* yang dapat digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan. Sehingga apabila

ada *website* layanan yang tidak bisa diakses segera diperbaiki.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Antoni, M., dkk (2018) mengungkapkan bahwa keterbatasan jaringan telekomunikasi yang ada di daerah-daerah atau bagian-bagian di wilayah kelurahan yang minim sinyal komunikasi dari jaringan seluler mengakibatkan warga atau masyarakat belum dapat mengakses portal layanan *E-Government* sehingga mereka tidak dapat menikmati akses layanan pemerintah tersebut.

Dye (2008:1), mengemukakan: “*Public policy is what ever governments choose to do or not to do*”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.

Program

Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan, adanya tahapan-tahapan tindakan atau program yang akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebijakan atau program terbaru dari pemerintah terkait pengembangan jaringan berbasis internet di Kabupaten Enrekang adalah Program Digital Desa dan Desa *Broadband*.

Gerakan 1000 Startup Digital adalah tahap awal pengembangan kewirausahaan digital dimana masyarakat dapat mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari *Ignition* sampai dengan *Incubation*. Kegiatan ini dilakukan agar peserta dapat menerjemahkan ide-ide menjadi sebuah model bisnis yang dapat dijalankan dan memastikan bahwa peserta juga sudah mempunyai tim yang dapat menjalankan model bisnis tersebut.

Menjadi sebuah unit terkecil yang ada di pemerintahan, desa atau

kelurahan dapat mendukung terciptanya kota pintar atau *smart city*. Desa yang pintar akan mendukung Kota/Kabupaten yang pintar. Kota/Kabupaten yang pintar akan mendukung Provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung negara yang pintar. Oleh karena itu, dalam mewujudkan desa yang pintar, KEMKOMINFO melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara *online*. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK berbasis internet, sehingga dapat dilakukan dan di monitor secara *online*.

Pemerintah membuka akses komunikasi masyarakat desa 3T, adalah membuat program Desa *Broadband* Terpadu (DBT), yaitu penyediaan perangkat dan akses internet pada beberapa desa di Kabupaten Enrekang, berawal dari tersedianya sarana telekomunikasi di desa-desa tersebut, masyarakat akan mengetahui manfaatnya (Wahyuningsih & Kusumawati, 2015).

Program Petani Nelayan *Go Online* ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan aplikasi yang tepat guna menunjang usaha petani dan nelayan serta meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan.

Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain.

Program-program tersebut dapat terwujud apabila masyarakat Kabupaten Enrekang mampu berpartisipasi dalam pengembangan program tersebut. Karena strategi dan upaya pengembangan bertujuan untuk meningkatkan masyarakat. Selain itu diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dapat melakukan pengembangan-pengembangan program berbasis internet yang ada di Kabupaten Enrekang. Program-program yang

sudah direncanakan bukan tanpa kendala, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa dan bagaimana program tersebut. Banyaknya persepsi masyarakat beranggapan bahwa internet berkaitan dengan hal hal negatif.

Literasi digital merupakan solusi atau strategi dari pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini. Literasi digital dirancang untuk mendorong masyarakat dapat memahami *basic* penggunaan teknologi informasi. Program ini merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti *hoaks*, *cyberbullying* dan online *radicalism*. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara mensosialisasikan literasi digital ke berbagai sektor terutama pendidikan. Di antaranya, dengan mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Siberkreasi hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan media.

KESIMPULAN

Tujuan atau sasaran bisa dikatakan tepat apabila infrastruktur juga mendukung. Akan tetapi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Enrekang yang belum terjangkau jaringan internet, Strategi pemerintah untuk meghadapi permasalahan ini yakni penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, Permasalahan terkait sasaran yakni ada beberapa website dari instansi pemerintah atau dinas yang tidak bisa diakses, Dua faktor penyebabnya adalah keterbatasan SDM dan konten yang dapat diangkat ke dalam *website*. Terkait permasalahan diatas dibutuhkan strategi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam hal ini DISKOMINFO Kabupaten Enrekang, yakni mengikutsertakan dan memberikan pelatihan kepada admin *website* OPD atau Dinas terkait agar *website* OPD bisa dikelola dan *diupdate* secara mandiri. Pembaruan konten pada *website* sebaiknya dilakukan berkala untuk menarik minat masyarakat untuk mengakses *website*.

Strategi pemerintah dalam hal kebijakan pengembangan jaringan

telekomunikasi berbasis internet. Pembangunan BTS 4G untuk daerah yang belum terjangkau jaringan internet, Penambahan tersebut sebagai wujud perhatian DISKOMINFO Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan *provider* telekomunikasi dalam hal pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet. Selain itu salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah *E-Government*. Permasalahan terjadi karena beberapa *Website* yang tidak bisa diakses akan mempengaruhi sistem pelayanan berbasis internet. Dibutuhkan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Penyediaan pusat monitoring telekomunikasi terintegrasi merupakan solusi yang sangat penting bagi pemerintah sebagai *tool* dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpusat, terpadu, efektif dan efisien.

Program-program yang sudah direncanakan bukan tanpa kendala, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa dan bagaimana program tersebut. Banyaknya persepsi masyarakat beranggapan bahwa internet berkaitan dengan hal hal negatif. Literasi digital merupakan solusi atau strategi dari pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini. Literasi digital dirancang untuk mendorong masyarakat

dapat memahami *basic* penggunaan teknologi informasi. Program ini merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti *hoaks*, *cyberbullying* dan *online radicalism*. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital.

REFERENSI

- Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), pp. 1652-1659.
- Edwin, Locke. (1968). Toward a Theory of Tasks Motivation and Incentives. *American Institutes for Reaserch*, 3(2), pp. 157-189.
- Infopublik.id. (2018). Daerah Blank Spot Enrekang Mulai Dapat Perhatian. Diakses tanggal 14 Juni 2022, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/257122/daerah-blank-spot-enrekang-mulai-dapat-perhatian?show=>
- J. Winardi, (2003). *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman. Penyelenggaraan Pelayanan.

- Misdayanti dan KartaSaputra., (1993)., *Fungsi Pemda dalam Pembuatan Perda*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oetomo, B. S. D. (2002). *e-education: Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang No.51 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kabupaten Enrekang.
- Sri, W. (2015). *Perkembangan telekomunikasi* (Artikel, Universitas Teknologi Digital Indonesia, Yogyakarta), pp. 1–23.
- Sulsel.fajar.co.id. (2022). Tutupi Blank Spot Sulsel Pemprov Target Benahi 131 Titik Belum Tercover Jaringan. Diakses tanggal 14 Juni 2022. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/14/tutupi-blank-spot-sulsel-pemprov-target-benahi-131-titik-belum-ter-cover-jaringan/>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.